

**PENGARUH TEMUAN KELEMAHAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL,
TEMUAN KEPATUHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,
OPINI TAHUN SEBELUMNYA DAN UMUR PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP OPINI BPK-RI ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH DI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2014-2016**



Skripsi Oleh:

MARTINA DWI ARYANTI

01031181520036

AKUNTANSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI**

2019

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF
PENGARUH TEMUAN KELEMAHAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL,
TEMUAN KEPATUHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,
OPINI TAHUN SEBELUMNYA DAN UMUR PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP OPINI BPK-RI ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH DI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2014-2016

Disusun oleh :

Nama : Martina Dwi Aryanti

NIM : 01031181520036

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Mata Kuliah : Pengauditan

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing

Ketua



Tanggal: 05 Maret 2019

Dr. Yulia Saftiana, S.E., M. Si., Ak

NIP. 19670701 199203 2 003

Anggota



Tanggal: 01 Maret 2019

Umi Kalsum, S.E., M. Si., Ak

NIP. 19820703 201404 2 001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH TEMUAN KELEMAHAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, TEMUAN KEPATUHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, OPINI TAHUN SEBELUMNYA DAN UMUR PEMERINTAH DAERAH TERHADAP OPINI BPK-RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI SUMATERA SELATAN TAHUN 2014-2016

Disusun oleh :

Nama : Martina Dwi Aryanti

NIM : 01031181520036

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Bidang Kajian : Pengauditan

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 27 Maret 2019 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Inderalaya, 27 Maret 2019

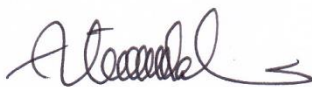
Ketua



Dr. Yulia Saftiana, S.E., M. Si., Ak

NIP. 19670701 199203 2 003

Anggota



Umi Kalsum, S.E., M. Si., Ak

NIP. 19820703 201404 2 001

Anggota



Drs. H. Burhannudin, M. Acc., Ak., CA

NIP. 19580828 198810 1 001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA

NIP. 19730317 199703 1 002

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Martina Dwi Aryanti

NIM : 01031181520036

Jurusan : Akuntansi

Bidang Kajian : Pengauditan

Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul:

“Pengaruh Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Internal, Temuan Kepatuhan pada Peraturan Perundang-undangan, Opini Tahun Sebelumnya dan Umur Pemerintah Daerah Terhadap Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Sumatera Selatan Tahun 2014-2016”.

Pembimbing:

Ketua : Dr. Yulia Saftiana, S.E., M. Si., Ak

Anggota : Umi Kalsum, S.E., M. Si., Ak

Tanggal Ujian : 27 Maret 2019

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan saya ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat dan gelar kesarjanaan.

Inderalaya, 27 Maret 2019

Penulis Pernyataan



Dwi Aryanti

NIM. 01031181520036

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu atau kesukaran itu (ada kelapangan) yakni kemudahan”. (QS. Al-Insyirah 94:5)

“Bekerja keras dan bersikap baiklah. Hal luar biasa akan terjadi”.
(Conan O’Brien)

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan skripsi ini untuk:

- Allah SWT
- Ibu dan Bapak
- Mamas dan Mbak
- Seluruh keluarga besarku
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Internal, Temuan Kepatuhan pada Peraturan Perundang-undangan, Opini Tahun Sebelumnya dan Umur Pemerintah Daerah Terhadap Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah daerah di Sumatera Selatan Tahun 2014-2016”. Shalawat beserta salam semoga senantiasa dihaturkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman, Aamiin.

Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Skripsi ini membahas mengenai pengaruh temuan kelemahan sistem pengendalian internal, temuan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan, opini tahun sebelumnya dan umur pemerintah daerah terhadap opini BPK-RI atas laporan keuangan pemerintah daerah di Sumatera Selatan. Selama penulisan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. namun kendala tersebut dapat diatasi berkat doa, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak.

Penulis menyadari terdapat banyak kekurangan baik dalam penyusunan maupun penyajiannya. Selanjutnya penulis memohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi kita semua dan penulis menerima kritik serta saran yang bersifat membangun guna perbaikan selanjutnya.

Inderalaya, 27 Maret 2019

Penulis,



Martina Dwi Aryanti

UCAPAN TERIMA KASIH

Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. **Allah SWT**, yang selalu memberikan karunia-Nya dan petunjuk.
2. Rektor Universitas Sriwijaya, Bapak **Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE** beserta jajarannya.
3. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Bapak **Prof. Dr. Taufiq, S.E., M.Si.**
4. Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Bapak **Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA** dan Ibu **Dr. E. Yumnaini, S.E., M. Si., Ak.** selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
5. Ibu **Dr. Yulia Saftiana, S.E., M. Si., Ak** dan Ibu **Umi Kalsum, S.E., M. Si., Ak** selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak membantu memberikan bimbingan, masukan, kritik, saran serta pengarahan dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Seluruh dosen penguji seminar proposal skripsi dan ujian komprehensif yang telah memberikan kritik dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu **Dra. Hj. Kencana Dewi, M.Sc., Ak., CA** selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan banyak nasehat dan arahan bagi penulis dari semester satu hingga penulis menyelesaikan skripsi.
8. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis selama masa studi.
9. Seluruh staf dan karyawan di Jurusan Akuntansi, bagian tata usaha dan ruang baca Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu dalam semua proses yang diperlukan penulis.

10. Pihak Pemprov Sumatera Selatan yang telah memberi kesempatan untuk mendapat bantuan “Program Kuliah Gratis” dan membantu biaya pendidikan penulis setiap semesternya sampai terselesaikan skripsi ini.
11. Ibu dan Bapakku tersayang, terimakasih yang tak terhingga atas cinta, kasih, sayang, doa, dukungan, nasihat, motivasi, perhatian dan segalanya. Semoga Ibu dan Bapak selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT.
12. Mamas, Mbak, Yai Sarman dan Adek Chaka terimakasih karena telah menjadi pendorong dan memberi motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT.
13. Pak òman yang selalu membimbing dan mengarahkan dalam penulisan skripsi, Semoga bapak selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT.
14. Sahabat terbaikku sejak kecil; Septi dan sahabatku selama kuliah yang senantiasa membantu; Jeje, Cece Dian, Desi, Chymel, Kelvin serta Kelompok “Serah Terima Hadiah”, Terima kasih atas segalanya semoga kita semua menjadi orang yang sukses.
15. M Faiz Al Ikhsan, terimakasih telah menjadi tempat berkeluh kesah.
16. Teman-teman Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Angkatan 2015, terimakasih atas kebersamaan yang indah selama perkuliahan.
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang dengan tulus telah memberikan dukungan, motivasi dan do’a sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis dalam kelancaran penyelesaian skripsi ini.

Inderalaya, 27 Maret 2019



Martina Dwi Aryanti

SURAT PERNYATAAN ABSTRAK

Kami Dosen Pembimbing Skripsi menyatakan bahwa abstraksi skripsi dari mahasiswa:

Nama : Martina Dwi Aryanti

NIM : 01031181520036

Jurusan : Akuntansi

Mata Kuliah : Pengauditan

Judul Skripsi : Pengaruh Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Internal, Temuan Kepatuhan pada Peraturan Perundang-undangan, Opini Tahun Sebelumnya dan Umur Pemerintah Daerah Terhadap Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Sumatera Selatan Tahun 2014-2016

Telah kami periksa cara penulisan, *grammer*, maupun susunan *tenses*-nya dan kami setuju untuk ditempatkan pada lembar abstrak.

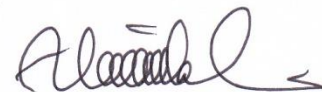
Inderalaya, 28 Maret 2019

Ketua

Anggota



Dr. Yulia Saftiana, S.E., M. Si., Ak
NIP. 19670701 199203 2 003



Umi Kalsum, S.E., M. Si., Ak
NIP. 19820703 201404 2 001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP. 19730317703 1 002

ABSTRAK

**PENGARUH TEMUAN KELEMAHAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL,
TEMUAN KEPATUHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,
OPINI TAHUN SEBELUMNYA DAN UMUR PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP OPINI BPK-RI ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH DI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2014-2016**

Oleh:

Martina Dwi Aryanti

Dr. Yulia Saftiana, S.E., M. Si., Ak., CA.

Umi Kalsum, S.E., M. Si., Ak.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh temuan kelemahan sistem pengendalian internal, temuan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan, opini tahun sebelumnya dan umur pemerintah daerah terhadap opini BPK-RI atas laporan keuangan pemerintah daerah di Sumatera Selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan yang terdiri dari 18 kabupaten/kota selama 3 tahun yaitu 2014, 2015 dan 2016. Sumber data penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dalam laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif dan regresi logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa opini tahun sebelumnya secara parsial berpengaruh negatif terhadap opini BPK-RI. Sementara variabel temuan kelemahan sistem pengendalian internal, temuan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan dan umur pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap opini BPK-RI.

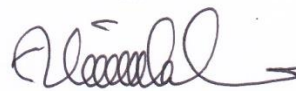
Kata Kunci: Sistem pengendalian internal, kepatuhan pada peraturan perundang-undangan, opini tahun sebelumnya, umur pemerintah daerah dan opini BPK-RI

Ketua



Dr. Yulia Saftiana, S.E., M. Si., Ak
NIP. 19670701 199203 2 003

Anggota



Umi Kalsum, S.E., M. Si., Ak
NIP. 19820703 201404 2 001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP. 19730317 199703 1 002

ABSTRACT

THE EFFECT OF FINDINGS OF WEAKNESS IN INTERNAL CONTROL SYSTEM, FINDINGS COMPLIANCE TOWARDS LAW AND REGULATION, PRIOR YEAR'S OPINION, THE AGE OF LOCAL GOVERNANCE TOWARDS BPK-RI'S OPINION ON FINANCIAL STATEMENT IN SOUTH SUMATERA DURING 2014-2016

By:

Martina Dwi Aryanti

Dr. Yulia Saftiana, S.E., M. Si., Ak., CA.

Umi Kalsum, S.E., M. Si., Ak.

The study aimed to examine the effect of findings of weakness in internal control system, compliance towards law and regulation, prior year's opinion and the age of local governance toward BPK-RI opinion on local governance's financial statement in South Sumatera. The populations in this study are all of local government districts/cities in South Sumatera which composed of 18 district/cities during 3 years namely 2014, 2015 and 2016. The techniques of data analysis in this study were descriptive statistics and logistic regression. The result showed that the prior year's opinion has partial negative on BPK-RI's opinion. Otherwise, findings of weakness in internal control system, findings compliance towards law and regulation and age of local governance have no significant effect on BPK-RI's opinion.

Keywords: *Internal control system, compliance towards law and regulation, prior year's opinion, age of local governance and BPK-RI's opinion*

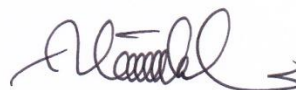
Advisor



Dr. Yulia Saftiana, S.E., M. Si., Ak

NIP. 19670701 199203 2 003

Member



Umi Kalsum, S.E., M. Si., Ak

NIP. 19820703 201404 2 001

*Acknowledged by,
Head of Accounting Department*



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA

NIP. 19730317 199703 1 002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Martina Dwi Aryanti
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Pati, 19 Maret 1997
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat Rumah : Jalan Orde Baru Rt. 027 Rw. 009 No. 1758 Kec.
Kemuning Kel. 20 Ilir D II Palembang
Alamat Email : dwimartina14@yahoo.com

PENDIDIKAN FORMAL

Tahun 2003-2009 : SD Negeri 182 Palembang
Tahun 2009-2012 : SMP Negeri 10 Palembang
Tahun 2012-2015 : SMA YPI Tunas Bangsa Palembang
Tahun 2015-2019 : S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas
Sriwijaya

PENGALAMAN ORGANISASI

2017 : Anggota Komunitas Palembang Social Project
2018-2019 : Anggota Komunitas Ketimbang Ngemis
Palembang

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
SURAT PERNYATAAN ABSTRAK.....	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Teori Legitimasi	11
2.1.2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	12
2.1.3 Opini Audit.....	17
2.1.4 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	19
2.1.4.1 Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Internal	19
2.1.4.2 Temuan Kepatuhan pada Peraturan Perundang-undangan	21
2.1.4.3 Opini Tahun Sebelumnya.....	23
2.1.4.4 Umur Pemerintah Daerah	24
2.2 Penelitian Terdahulu.....	25
2.3 Kerangka Pemikiran	28
2.4 Pengembangan Hipotesis.....	29
2.4.1 Pengaruh Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Internal terhadap Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di	

Sumatera Selatan	29
2.4.2. Pengaruh Temuan Kepatuhan pada Peraturan Perundang-undangan terhadap Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan	30
2.4.3 Pengaruh Opini tahun Sebelumnya terhadap opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan	32
2.4.4 Pengaruh Umur Pemerintah Daerah terhadap Opini BPK- RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1 Jenis Penelitian	34
3.2 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel	35
3.3 Jenis Data dan Sumber Data	36
3.4 Teknik Pengumpulan data	36
3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	36
3.5.1 Opini	37
3.5.2 Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Internal	37
3.5.3 Temuan Kepatuhan pada Peraturan Perundang-undangan	38
3.5.4 Opini Tahun Sebelumnya	38
3.5.5 Umur Pemerintah Derah	39
3.6 Metode Analisis Data	39
3.6.1 Statistik Deskriptif.....	40
3.6.2 Analisis Pengujian Asumsi Klasik	40
3.6.2.1 Uji Multikolonieritas	41
3.6.3 Analisis Uji Hipotesis.....	41
3.6.3.1 Menilai Keseluruhan (<i>Overall Model Fit</i>).....	41
3.6.3.2 Menguji Kelayakan Model Regresi.....	42
3.6.3.3 Matriks Klasifikasi	42
3.6.3.4 Analisis Regresi Logistik.....	42
3.6.3.5 Uji Pengaruh Parsial (<i>Uji Wald</i>).....	43
3.6.3.6 Koefisien Determinansi (<i>Nagelkerke R Square</i>)	44
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	45
4.1 Analisis Data	45
4.1.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	45
4.1.2 Analisis Pengujian Klasik.....	47
4.1.2.1 Uji Multikolonieritas	47
4.1.3 Analisis Uji Hipotesis	48
4.1.3.1 Menilai Model Fit (<i>Overall Model Fit</i>)	48
4.1.3.2 Menguji Kelayakan Model Regresi.....	50

4.1.3.3 Matriks Klasifikasi Model	51
4.1.3.4 Analisis Regresi logistik.....	52
4.1.3.5 Uji Pengaruh Parsial (<i>Uji Wald</i>).....	54
4.1.3.6 Koefisien Determinasi (<i>Nagelkerke R Square</i>).....	55
4.2 Pembahasan	56
4.2.1 Pengaruh Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	57
4.2.2 Pengaruh Kepatuhan pada Peraturan Perundang- undangan Terhadap Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	58
4.2.3 Pengaruh Opini Tahun Sebelumnya Terhadap Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	60
4.2.4 Pengaruh Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	61
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	63
5.1 Kesimpulan.....	63
5.2 Keterbatasan Penelitian	63
5.3 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Opini Audit BPK RI Terhadap LKPD Tahun 2014-2016	4
Tabel 2.1	Hasil dari Penelitian-Penelitian Terdahulu	25
Tabel 4.1	Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	45
Tabel 4.2	Hasil Uji Multikolonieritas	48
Tabel 4.3	Hasil Uji Fit 1.....	49
Tabel 4.4	Hasil Uji Fit 2.....	49
Tabel 4.5	Uji Kelayakan Model Regresi.....	50
Tabel 4.6	Hasil Matriks Klasifikasi	51
Tabel 4.7	Hasil Uji Regresi Logistik	52
Tabel 4.8	Hasil Uji Parsial	54
Tabel 4.9	Hasil Uji Koefisien Determinasi	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran.....	29
------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Nama Pemda yang Menjadi Sampel Penelitian	69
Lampiran 2. Daftar Opini Audit	70
Lampiran 3. Daftar Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Internal.....	71
Lampiran 4. Daftar Temuan Kepatuhan pada Peraturan Perundang-undangan.....	72
Lampiran 5. Daftar Opini Tahun Sebelumnya.....	73
Lampiran 6. Daftar Umur Pemerintah Daerah.....	74
Lampiran 7. Tabulasi Keseluruhan Data Penelitian.....	75
Lampiran 8. Hasil Uji Statistik Deskriptif	78
Lampiran 9. Hasil Uji Asumsi Klasik	79
Lampiran 10. Hasil Uji Hipotesis	80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Disentralisasi fiskal yang diterapkan di Indonesia pada awal Januari 2001 telah memberikan wewenang bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggarannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah untuk kesejahteraan bagi masyarakat, dimana pemerintah pusat memiliki peran sebagai pengawas atas pelaksanaan disentralisasi fiskal tersebut. Pemerintah daerah berkewajiban untuk melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangannya kepada pemerintah pusat dan masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Jaminan akan kualitas atas akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah diberikan dalam bentuk pernyataan atau pendapat profesional Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) yang dikenal dengan opini audit BPK RI (Maabuat dkk, 2014).

Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi opini audit telah dilakukan oleh penelitian terdahulu. Menurut Setiawan (2017) sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pemberian opini wajar tanpa pengecualian oleh auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam

pemeriksaannya terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Kusumawati dan Ratmono (2017) menyatakan bahwa, semakin banyak jumlah temuan kelemahan sistem pengendalian internal, maka akan semakin buruk opini atas laporan keuangan pemerintah daerah atau semakin sedikit jumlah temuan terkait kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI) maka akan semakin baik opini atas laporan keuangan pemerintah daerah yang diperoleh.

Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II tahun 2016, kenaikan opini terjadi karena Pemda telah menindaklanjuti hasil audit BPK tahun 2015 dengan cara melakukan perbaikan pada sistem pengendalian internal maupun kepatuhan terhadap perundang-undangan sehingga akun-akun yang disajikan telah sesuai dengan aturan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Meskipun demikian, masih ditemukan kelemahan SPI dan kepatuhan pada audit BPK atas LKPD. Temuan kelemahan SPI dikelompokkan menurut BPK dalam IHPS II tahun 2016 menjadi tiga yaitu:

1. Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan
2. Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja
3. Kelemahan struktur pengendalian intern

Selain sistem pengendalian intern, auditor juga harus mempertimbangkan kepatuhan terhadap undang-undang dalam pemeriksaannya. Karena bagi auditor dalam memberikan pendapatnya tidak hanya menyakini bahwa laporan keuangan

telah disajikan secara benar dan sesuai dengan standar akuntansi tetapi wajib memperhatikan relevansinya terhadap undang-undang yang berlaku (CPA Australia Ltd, 2013). Maka dari itu, laporan keuangan khususnya untuk sektor publik harus memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan otoritas penguasa tentang pengelolaan sumber daya yang dilakukan telah memenuhi ketentuan hukum yang ditetapkan (Mardiasmo, 2002). Menurut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II tahun 2016 BPK RI, temuan ketidakpatuhan terdiri dari empat kelompok temuan. Pengelompokan tersebut berdasarkan jumlah kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, temuan administrasi.

Hubungan antara kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern terhadap pemberian opini atas laporan keuangan pemerintah telah menjadi dasar atau kriteria pemberian opini oleh BPK RI menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004. Melihat pada Buletin Teknis 01 tentang Pelaporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan keuangan Pemerintah paragraf 13 mengemukakan tentang empat jenis opini yang bisa diberikan oleh BPK yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (OTP), dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Selama kurun waktu tiga tahun (2014-2016) BPK telah melakukan audit pada 1623 laporan keuangan pemerintah daerah, dari hasil audit terdapat total 943 opini WTP termasuk WTP dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP). Perkembangan opini laporan keuangan pemerintah daerah dapat dilihat pada tabel 1.1:

Tabel 1.1 Opini Audit BPK RI Terhadap LKPD Tahun 2014-2016

Tahun	WTP	WDP	TW	TMP	Jumlah LKPD
2014	252	247	5	35	539
2015	313	194	4	31	542
2016	378	141	0	23	542
Jumlah	943	582	9	89	1623

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2015-2017 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (data diolah)

Dari tabel 1.1 dilihat bahwa terjadi peningkatan persentase LKPD yang memperoleh opini WTP. Apabila dibandingkan dengan tahun 2015, kualitas LKPD pada tahun 2016 mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan peningkatan opini WTP sebesar 12%, yaitu dari 58% menjadi 70% pada LKPD tahun 2016. Sedangkan LKPD yang memperoleh opini WDP sebanyak 194 LKPD pada 2015 menjadi 141 LKPD pada 2016 atau menurun sebesar 10%. Opini TW dan TMP sebanyak 23 pada tahun 2016 dari sebelumnya 31 LKPD. Persentase LKPD yang mendapatkan opini TW dan TMP masing-masing 0% dan 4% pada tahun 2016.

Namun selain itu, menarik untuk mengetahui tentang bagaimana konsistensi BPK RI dalam memberikan opini atas LKPD, apakah dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya, misalnya dengan adanya penelitian terdahulu yang memperlihatkan sulitnya pemerintah daerah untuk memperoleh opini WTP yang disebabkan oleh masalah penyelesaian rekomendasi tahun-tahun sebelumnya dan ditunjukkan dengan adanya rekomendasi tahun-tahun sebelumnya yang tindaklanjutnya tidak sesuai dengan rekomendasi BPK dan juga

terdapat rekomendasi yang belum ditindaklanjuti pemerintah daerah karena membutuhkan waktu yang lama dalam penyelesaiannya (Fatimah dkk, 2014). Sehingga dari kondisi tersebut dapat memungkinkan pemerintah daerah untuk mendapatkan opini audit yang sama dengan opini audit tahun sebelumnya (Atyanta, 2010).

Perkembangan dari opini laporan keuangan pemerintah daerah lainnya yang perlu dicermati dari Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2016 BPK RI, atas perolehan opini dari tahun 2014 s.d. 2016 adalah perolehan opini WTP tidak hanya untuk pemerintah daerah yang sudah lama terbentuk namun juga bagi pemerintah daerah yang baru terbentuk melalui pemekaran wilayah. Padahal pemerintah daerah yang sudah lama terbentuk, tentu akan dinilai lebih dulu memiliki kemampuan dalam hal teknis dan dapat memfasilitasi peningkatan kemampuan kelembagaan pemerintahan daerah, sumber daya manusia, kepegawaian daerah, pengelolaan keuangan daerah, dan pelayanan publik (Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007) bila dibandingkan dengan pemerintah daerah yang baru terbentuk melalui pemekaran wilayah. Maka dari itu, peneliti berupaya melihat keterkaitan variabel lainnya yaitu pengaruh opini audit tahun sebelumnya dan umur pemerintah daerah terhadap penerimaan opini laporan keuangan pemerintah daerah. Pengaruh opini audit tahun sebelumnya terhadap pemberian opini audit hanya ditemukan dalam penelitian untuk perusahaan atau sektor manufaktur (Fatimah dkk, 2014). Sedangkan pengaruh umur pemerintah daerah terikat dengan kemampuan yang dimiliki pemerintah daerah yang lebih lama terbentuk dinilai lebih baik dibandingkan dengan

pemerintah daerah yang baru terbentuk dalam urusan pengelolaan keuangan daerah yang dibuktikan dari hasil penelitian (Setyaningrum dan Syafitri, 2012).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Irman dan Suryati (2017) yang berjudul “Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Internal, Ketidapatuhan pada Peraturan Perundang-undangan, Opini Tahun Sebelumnya dan Umur Pemerintah Daerah Terhadap Opini Audit di Kabupaten/Kota Provinsi Riau”. Perbedaannya terletak pada objek penelitian, dimana objek dari penelitian ini adalah Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari 18 kabupaten/kota sebagaimana terdapat dalam IHPS II tahun 2016. Oleh karena belum banyak penelitian yang dilakukan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi opini laporan keuangan pemerintah daerah dan objek penelitian yang masih terbatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian pada pemerintah daerah yang telah diperiksa laporan keuangan pemerintah daerahnya oleh BPK RI yaitu opini atas laporan keuangan pemerintah provinsi Sumatera Selatan untuk tahun 2014-2016.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian lebih lanjut, penelitian ini penulis beri judul **“Pengaruh Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Internal, Temuan Kepatuhan pada Peraturan Perundang-undangan, Opini Tahun Sebelumnya dan Umur Pemerintah Daerah Terhadap Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Sumatera Selatan Tahun 2014-2016”**.

1.2. Perumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan hasil yang dicapai tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan maka diperlukan adanya perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh temuan kelemahan sistem pengendalian internal terhadap opini BPK-RI atas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Bagaimana pengaruh temuan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan terhadap opini opini BPK-RI atas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Bagaimana pengaruh opini tahun sebelumnya terhadap opini opini BPK-RI atas laporan keuangan pemerintah daerah?
4. Bagaimana pengaruh umur pemerintah daerah terhadap opini opini BPK-RI atas laporan keuangan pemerintah daerah?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi bagaimana pengaruh temuan kelemahan sistem pengendalian internal terhadap opini opini BPK-RI atas laporan keuangan pemerintah daerah

2. Untuk mengidentifikasi bagaimana pengaruh temuan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan terhadap opini opini BPK-RI atas laporan keuangan pemerintah daerah
3. Untuk mengidentifikasi bagaimana pengaruh opini tahun sebelumnya terhadap opini opini BPK-RI atas laporan keuangan pemerintah daerah
4. Untuk mengidentifikasi bagaimana pengaruh umur pemerintah daerah terhadap opini opini BPK-RI atas laporan keuangan pemerintah daerah

1.4. Manfaat Hasil Penelitian

Selain tujuan di atas, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi mengenai pengaruh temuan kelemahan sistem pengendalian internal, tingkat kepatuhan pada perundang-undangan, opini audit di tahun sebelumnya dan umur pemerintah daerah terhadap opini opini BPK-RI atas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam mengembangkan efektivitas sistem pengendalian internal dan pada tingkat entitas atas kepatuhan terhadap perundang-undangan di lingkungan pemerintah daerah sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), penelitian ini dapat memberikan manfaat terkait pengembangan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh

BPK mengenai temuan kelemahan sistem pengendalian internal dan temuan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan dalam pemberian opini agar dapat meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah.

1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi pada penelitian ini terdiri dari lima bab, dimana tiap-tiap bab akan disusun secara sistematis sehingga akan menggambarkan hubungan antara satu bab dengan bab lainnya, antara lain :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang merupakan kerangka penulisan skripsi secara keseluruhan.

BAB II STUDI KEPUSTAKAAN

Bab ini menyajikan teori yang relevan dengan topik skripsi yang akan dijadikan landasan dalam penulisan skripsi, sejumlah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian sehingga mendukung proses penulisan skripsi, kerangka pemikiran serta hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan oleh penulis yang ada didalamnya membahas mengenai jenis penelitian; populasi,

sampel dan teknik pengambilan sampel; jenis dan sumber data; teknik pengumpulan data; definisi operasional; serta teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian mengenai pengaruh temuan kelemahan sistem pengendalian internal, temuan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan, opini tahun sebelumnya dan umur pemerintah daerah terhadap opini audit di kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, keterbatasan dan saran yang bermanfaat bagi berbagai pihak untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiani, A. N., Rahayu, S., dan Nurbaiti, A. (2017). Jumlah Temuan Audit Atas Sistem Pengendalian Intern dan Jumlah Temuan Audit Atas Kepatuhan Terhadap Opini LKPD Pemerintah Kota/Kabupaten di Jawa Barat. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer (JRAK)*, 9 (1)(1), 12–19.
- Atyanta, R. (2010). Analisis Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten X di Jawa Timur). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya*, 1(07), 1–18. Retrieved from <http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/310>
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2016. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I dan II Tahun 2014 -2016. www.bpk.go.id
- CPA Australia Ltd. 2012. A guide to understanding auditing and assurance: Listed Companies February 2013. Australia. pp 8
- Deegan, C. 2002. Introduction: The Legitimising Effect of Social and Environmental Disclosure - A Theoretical Foundation. *Accounting, Auditing, and Accountanbility Journal*, Vol.5 No.3: 282-311.
- Fatimah, D., Sari, R. N., dan Rasuli, M. (2014). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Opini Audit Tahun Sebelumnya Dan Umur Pemerintah Daerah Terhadap Penerimaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Seluruh Indonesia. *Jurnal Akuntansi Media Riset Akuntansi Dan KEUANGAN*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Ghozali. (2011). tujuan uji heterokedasitas. In *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang.
- Institut Akuntan Publik Indonesia. (2013). Standar Audit (“ SA ”) 7 10 Informasi Komparatif – Angka Koresponding dan Laporan Keuangan, 1–19.
- Irman, M., dan Suryati. (2017). Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Internal, Ketidakpatuhan pada Peraturan Perundang-undangan, Opini Tahun Sebelumnya dan Umur Pemerintah Daerah Terhadap Opini Audit di Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2011-2014, 197–209.
- Kusumawati, D., dan Ratmono, D. (2017). Determinan Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Tesis, Program Magister Ilmu Akuntansi FEB Universitas Lampung*, 6, 1–15.
- Maabuat, J. S., Morasa, J., dan Saerang, D. P. E. (2014). Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Internal, Ketidakpatuhan pada Peraturan Perundang-undangan dan Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, 52–62.

- Munawar, Nadirsyah, dan Abdullah, S. (2016). PENGARUH JUMLAH TEMUAN AUDIT ATAS SPI DAN JUMLAH TEMUAN AUDIT.pdf. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 57–67.
- Peraturan BPK RI No.1 Tahun 2007. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. 7 Maret 2007.Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No.2 42. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Pratiwi, R., dan Aryani, Y. A. (2017). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Kepala Daerah, Tindak Lanjut Temuan Audit Terhadap Opini. *Jurnal Akuntansi*, 20(2), 167. <https://doi.org/10.24912/ja.v20i2.52>
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, J § (2004). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Per UU § (2008). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Rosadi, S., Siyamto, Y., dan Aisyiah, H. N. (2017). Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan, Kelemahan Sistem Pengendalian Internal, Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan, Status Daerah dan Ukuran Daerah Terhadap Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Pulau Jawa Tahun 2013. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 03(02), 99–111.
- Safitri, N. L. K. S. A., dan Darsono, D. (2015). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Temuan Kepatuhan Terhadap Opini Audit Pada Pemerintah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 5(1), 1–12.
- Setiawan, R. A. (2017). Pengaruh sistem pengendalian intern dan kepatuhan pada peraturan perundang- undangan terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah.
- Setyaningrum, D., dan Syafitri, F. (2012). Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 9(2), 154–170. <https://doi.org/10.21002/jaki.2012.10>
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. [https://doi.org/10.1016/S0084-3970\(08\)79262-4](https://doi.org/10.1016/S0084-3970(08)79262-4)
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. In *Climate Change 2013 - The Physical Science Basis*.

<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Widodo, O. P., dan Sudarno. (2017). Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Dan Temuan Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(2010), 1–9.